

## ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 BAB IV DAN BAB V

**T. Riza zarzani<sup>1</sup>, Edy Syahputra Lubis<sup>2</sup>, Rany Ayu Lutfiah Maharaja<sup>3</sup>, Fitri Handayani Hasibuan<sup>4</sup>, Indra saputra<sup>5</sup>**

tengkuriza49@gmail.com<sup>1</sup>, syahputra206@gmail.com<sup>2</sup>, bellaranyamaharaja@gmail.com<sup>3</sup>,  
fitrihsbtigasatu@gmail.com<sup>4</sup>, indraherman538@gmail.com<sup>5</sup>

**Universitas Panca Budi**

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Bab IV dan Bab V dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. Bab IV membahas tentang pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara, sedangkan Bab V membahas tentang pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia. Melalui analisis ini, penulis berusaha untuk memahami implikasi hukum dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta dampaknya terhadap masyarakat.

**Kata Kunci:** Undang-Undang, No. 17 Tahun 2023, Bab IV, Bab V, Hak dan Kewajiban Warga Negara.

**Abstract:** This article aims to analyze Chapter IV and Chapter V of Law no. 17 of 2023. Chapter IV discusses regulations regarding the rights and obligations of citizens, while Chapter V discusses regulations regarding the protection of human rights. Through this analysis, the author seeks to understand the legal implications of the provisions in this law and their impact on society.

**Keywords:** Law, no. 17 of 2023, Chapter IV, Chapter V, Rights and Obligations of Citizens.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 merupakan salah satu undang-undang penting dalam sistem hukum negara kita. Dalam undang-undang ini, Bab IV dan Bab V memiliki peran yang signifikan dalam memastikan hak-hak warga negara dilindungi dan hak asasi manusia dihormati. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan sebuah peraturan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini memiliki berbagai bab dan pasal yang membahas berbagai aspek penting dalam sistem kesehatan kita. Dalam artikel ini, kita akan lebih fokus membahas Bab IV dan Bab V dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berkaitan dengan upaya pencegahan, pengendalian, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

### **Analisis Bab IV: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**

Dalam BAB ini perlu diketahui bahwa Penyelenggaraan Kesehatan menjadi pokok ulasannya. Menilik dalam pengertian bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesehatan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna di bidang kesehatan. Yang terdiri dari:

1. Upaya Kesehatan
2. Sumber daya kesehatan
3. Pengelolaan kesehatan.

Penyelenggaraan kesehatan harus mendorong adanya kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif serta Paliatif yang berdampak pada individu ataupun masyarakat. Karena penyelenggaraan kesehatan sangat penting maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi menjadi dua untuk peran tanggung jawab yang termaktub dalam pasal 19 ayat 1 sampai 3. Sumber Daya Manusia juga merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan kesehatan terdiri dari fasilitas kesehatan, perbekalan, teknologi, informasi dan pendanaan yang menjadi satu kesatuan pelaksanaan dalam pengelolaan kesehatan di Indonesia. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus terus bersinergi untuk mencapai derajat kesehatan Indonesia yang optimal. Salah satunya adalah Penyakit menular merupakan masalah serius yang dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan pengendalian penyakit menular menjadi sangat penting.

Salah satu fokus utama dalam Bab IV ini adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Vaksinasi adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Melalui undang-undang ini, pemerintah mendorong program-program vaksinasi yang lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat. Program-program ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyuluhan hingga pelaksanaan vaksinasi massal di berbagai wilayah.

Selain itu, Bab IV juga membahas tentang pengendalian penyakit menular melalui upaya deteksi dini dan karantina. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap penyakit menular yang mungkin muncul di wilayah Indonesia. Jika terdapat kasus penyakit menular yang signifikan, pemerintah berwenang untuk memberlakukan karantina sebagai langkah pencegahan penyebaran yang lebih lanjut.

### **Bab V: Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Hak dan Kewajiban Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Bab V mengatur tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Bidang Kesehatan. Bab ini terdiri dari 11 Pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh akses terhadap sumber daya kesehatan, pelayanan kesehatan, lingkungan yang sehat, dan informasi dan edukasi kesehatan.

### **Hak Masyarakat dalam Bidang Kesehatan**

Pasal 24 UU Kesehatan mengatur tentang hak masyarakat dalam bidang kesehatan. Hak masyarakat dalam bidang kesehatan meliputi:

- Hak atas kesehatan
- Hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan
- Hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau
- Hak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan
- Hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab

### **Kewajiban Masyarakat dalam Bidang Kesehatan**

Pasal 25 UU Kesehatan mengatur tentang kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan. Kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan meliputi:

- Berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya
- Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya
- Menghormati hak orang lain dalam bidang kesehatan

### **METODE PENELITIAN**

Metode ini melibatkan pembacaan dan pemahaman dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan hukum.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara umum, pengaturan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan dalam UU Kesehatan sudah cukup baik. Pengaturan ini telah memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya kesehatan, pelayanan kesehatan, lingkungan yang sehat, dan informasi dan edukasi kesehatan.

Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan pengaturan ini, yaitu:

- Penjelasan yang lebih rinci tentang hak dan kewajiban masyarakat. Beberapa hak dan kewajiban masyarakat dalam UU Kesehatan masih bersifat umum dan perlu dijelaskan lebih rinci agar dapat diterapkan secara efektif. Misalnya, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab perlu dijelaskan secara rinci agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat dan akurat.
- Pengembangan mekanisme penegakan hak dan kewajiban masyarakat. Mekanisme penegakan hak dan kewajiban masyarakat perlu dikembangkan agar hak dan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Misalnya, perlu ada mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pengaturan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan dalam UU Kesehatan:

- Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam bidang kesehatan. Sosialisasi dan edukasi ini perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dan dapat melaksanakannya secara efektif.
- Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme penegakan hak dan kewajiban masyarakat. Mekanisme penegakan hak dan kewajiban masyarakat perlu dikembangkan agar hak dan

kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Misalnya, perlu ada mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar.

Dengan adanya peningkatan pengaturan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia

#### **Pembahasan dan Rekomendasi:**

- Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam UU Kesehatan secara umum sudah baik, namun perlu penjelasan lebih rinci agar dapat diterapkan secara efektif.
- Mekanisme penegakan hak dan kewajiban masyarakat perlu dikembangkan, misalnya melalui sosialisasi, edukasi, dan pengaduan.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan dapat mendorong tercapainya derajat kesehatan yang optimal.

Bab V dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membahas tentang upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi sangat penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional yang lebih baik. Dalam Bab V ini, terdapat beberapa hal yang diatur untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Pertama, pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, Bab V juga mengatur tentang perlunya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar medis yang berlaku.

Selanjutnya, Bab V juga membahas tentang akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Pemerintah diwajibkan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan yang diberikan. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil.

#### **KESIMPULAN**

Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah sebuah peraturan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Dalam Bab IV, undang-undang ini mengatur tentang upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, termasuk melalui program vaksinasi dan pengendalian melalui deteksi dini dan karantina. Sementara itu,

Bab V mengatur tentang upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan, melalui pemantauan dan evaluasi, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Melalui undang-undang ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam sektor kesehatan. Dengan adanya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang lebih efektif, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, kuat, dan produktif. Kesehatan merupakan landasan hukum penting untuk membangun sistem kesehatan yang inklusif dan partisipatif. Dengan memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam bidang kesehatan, seluruh pihak dapat berkontribusi terhadap terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan sejahtera. Harapannya, pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan memicu diskusi lebih lanjut tentang pentingnya peran masyarakat dalam mewujudkan sistem kesehatan yang ideal bagi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Internet

- Mengekspresikan Pendapat melalui Kebebasan Berorganisasi, diakses melalui <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/17/1986/mengekspresikan-pendapat-melalui-kebebasan-berorganisasi.html>, Pada 23 januari 2024 Pkl. 13.00 Wib.
- MK Gelar Sidang Perdana Uji UU Kesehatan yang Digugat ID diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231013012659-12-1010634/mk-gelar-sidang-perdana-uji-uu-kesehatan-yang-digugat-idi>. Pada 23 januari 2024 Pkl. 13.00 Wib.
- Sistematika Penulisan Skripsi Secara Umum dan Penjelasannya, diakses melalui <https://kumparan.com/berita-hari-ini/sistematika-penulisan-skripsi-secara-umum-dan-penjelasannya-1yP3389ya0l> Diakses Pada Selasa Tanggal 23 Januari 2024 Pukul 14:09 Wib.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Anggaran Kesehatan Tahun 2021.
- World Health Organization. (2021). World Health Statistics 2021: Monitoring Health for the **SDGs**.